BIRO KEUANGAN **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER** **Jl. Kampus ITS Keputih Sukolilo** **Surabaya, PO BOX 60111**	**NOMOR SOP**	6.7.5.1
	TGL PEMBUATAN	1 April 2026
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	01 Juli 2026
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Keuangan, **Diana Ekawati, S.T.** NIP. 197708302009122001
	NAMA SOP	**PENGAJUAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR (GUBES)**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	1. Memahami peraturan tentang pembayaran Tunjangan Kehormatan Guru Besar. 2. Menguasai aplikasi SAKTI. 3. Mampu mengoperasikan Microsoft Office.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
Pencairan Tunjangan Guru Besar yang dilakukan diproses pada minggu pertama setiap bulannya untuk menunjang kinerja Dosen.	1. SK Rektor ITS tentang penerima Tunjangan Guru Besar dari SDMO. 2. Aplikasi SAKTI. 3. Jaringan internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Pencairan Tunjangan Guru Besar sesuai nama yang tertera pada SK Rektor serta mengeliminasi Dosen yang sedang pensiun.	1. Dokumen SPM dan SP2D untuk meningkatkan transparansi kinerja keuangan. 2. Dokumen SPM dan SP2D untuk memonitoring penyerapan APBN.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SDMO	BK	KPPN	Para Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Layanan Gaji menerima SK tunjangan gubes dari SDMO					Data Dosen penerima gubes yang lulus BKD	30 Menit	Ajuan pencairan gubes	Ketentuan penghentian pembayaran Tunjangan Kehormatan Guru Besar jika pegawai tersebut meninggal dunia, sedang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas, pensiun
2	Layanan Gaji memverifikasi data penerima gubes, mengolah dan menghitung pajak					Data Dosen penerima gubes	2 Jam	ADK CSV pencairan gubes	Perhitungan sbb : 1. Tarif Tunjangan Kehormatan Guru Besar sebesar 2 kali gaji pokok. 2. Pengenaan tarif pajak sesuai PP No. 80 Tahun 2010, sesuai tarif Pasal 17 (1)
3	PPABP membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Aplikasi SAKTI Kemenkeu					Daftar SPP	2 Jam	Dokumen Surat Permintaan Pembayaran	
4	Bendahara Pengeluaran menandatangani berkas kelengkapan SPP secara elektronik					Berkas pajak	1 Jam	SSP Barcode	
5	PPK mengapprove SPP melalui Aplikasi SAKTI					Daftar Validasi SPP	15 Menit	Approval SPP LS gubes melalui SAKTI	
6	PPABP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)					Daftar SPM	1 Jam	Dokumen Surat Perintah Membayar	
7	PPSPM mengeprove SPM melalui Aplikasi SAKTI dan mengajukan ke KPPN					Daftar Validasi SPM	15 Menit	Approval SPM LS gubes melalui SAKTI	
8	KPPN Menolak atau menyetujui pembayaran SPM gubes					SPM Barcode, lampiran SPM dan pajak	2 Jam	ADK SPM	
9	BUN pada KPPN akan memproses pencairan					SPM Barcode, lampiran SPM dan pajak	3 Jam	Terbit Nomor Invoice/Nomor Resume Tagihan	
10	BUN melakukan konfirmasi Bank					Daftar para penerima gubes	2 Jam	Terbit Nomor SP2D	
11	Dana dari BUN akan ditransfer langsung ke penerima gubes					Nomor SP2D	Real Time	Diterimakan ke masing-masing rekening yang bersangkutan	Apabila terjadi kelebihan pembayaran maka yang bersangkutan wajib mengembalikan untuk disetorkan ke kas negara
12	Selesai								

